

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya di Desa Girirejo berdasarkan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, kebijakan telah berjalan dan memberikan dampak positif, namun capaian tersebut belum merata di seluruh wilayah desa. Pada indikator efektivitas, kebijakan mampu meningkatkan kebersihan lingkungan dan mengurangi praktik pembuangan sampah sembarangan bagi masyarakat yang telah terlayani. Namun, efektivitas masih terbatas karena cakupan layanan belum menjangkau seluruh dusun, sehingga perubahan perilaku belum terjadi secara menyeluruh. Pada indikator efisiensi, dukungan anggaran desa memungkinkan operasional TPS 3R berjalan rutin, tetapi keterbatasan armada dan tenaga kerja menyebabkan pemanfaatan sumber daya belum maksimal serta memengaruhi konsistensi layanan. Dari sisi kecukupan, keberadaan TPS 3R telah menjawab kebutuhan pengelolaan sampah rumah tangga di sebagian wilayah desa, tetapi kapasitas pengolahan dan jangkauan layanan belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Pada indikator pemerataan, manfaat kebijakan lebih dirasakan oleh dusun yang telah berlangganan layanan, sementara masih terdapat dusun yang belum terlayani secara rutin, sehingga distribusi manfaat belum berlangsung secara adil dan

setara. Dalam perspektif evaluasi Dunn, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang bersifat universal dan realitas implementasi yang masih terbatas kapasitasnya. Pada indikator responsivitas, pemerintah desa dan pengelola TPS 3R menunjukkan keterbukaan terhadap masukan masyarakat serta melakukan penyesuaian teknis, meskipun respons tersebut masih bersifat reaktif. Sementara itu, pada indikator ketepatan, kebijakan telah dirumuskan sesuai kebutuhan lokal dan memiliki dasar normatif yang jelas, namun keterbatasan kapasitas operasional menyebabkan implementasinya belum sepenuhnya seragam di seluruh wilayah desa. Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya dapat dikategorikan berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang telah terlayani, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kecukupan dan pemerataan karena masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses dan manfaat kebijakan secara setara.

2. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang saling berinteraksi dalam praktik implementasi di tingkat desa. Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan meliputi dukungan kelembagaan Pemerintah Desa Girirejo melalui keberadaan Peraturan Desa dan pengawasan administratif, responsivitas pengelola TPS 3R dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat, serta partisipasi sosial masyarakat yang mulai tumbuh, baik dalam bentuk pembayaran iuran, praktik pengurangan sampah, maupun kontrol sosial informal. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan juga dihadapkan pada faktor

penghambat yang signifikan, terutama keterbatasan kapasitas operasional berupa armada dan tenaga kerja, variasi tingkat partisipasi dan kesiapan masyarakat antar dusun, serta fleksibilitas sosial yang memengaruhi konsistensi penerapan kebijakan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mampu menjamin pelayanan yang stabil, merata, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya tidak hanya ditentukan oleh kuatnya faktor pendukung, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dan pengelola TPS 3R dalam mengelola serta menekan faktor penghambat agar pelaksanaan kebijakan tetap bergerak searah dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek keterwakilan informan dan cakupan analisis empiris. Informan masyarakat yang diwawancarai berjumlah lima orang dan seluruhnya berasal dari dusun yang telah berlangganan layanan TPS 3R Giri Mulya, sehingga perspektif masyarakat dari dusun yang belum terlayani belum tergali secara langsung. Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan pendalaman analisis, khususnya pada indikator pemerataan dan responsivitas dalam kerangka evaluasi William N. Dunn, karena distribusi manfaat dan potensi kerugian kebijakan belum sepenuhnya dianalisis dari sudut pandang kelompok yang belum memperoleh akses layanan. Selain itu, keterbatasan data kuantitatif komparatif antar dusun serta rentang waktu penelitian yang bersifat potret sesaat menyebabkan evaluasi lebih berorientasi pada dinamika implementasi pada fase tertentu, sehingga ruang

pengembangan analisis longitudinal dan representasi sosial yang lebih luas tetap terbuka bagi penelitian selanjutnya.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya di Desa Girirejo, penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Girirejo

Pemerintah Desa Girirejo disarankan untuk memperkuat peran koordinatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R, khususnya dalam memperluas cakupan layanan ke seluruh dusun secara bertahap dan terencana. Selain itu, pemerintah desa perlu mengalokasikan dukungan anggaran dan kebijakan yang lebih adaptif untuk penambahan armada, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan mekanisme evaluasi dan pengaduan yang lebih sistematis agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih merata dan efisien.

2. Pengelola TPS 3R Giri Mulya

Pengelola TPS 3R Giri Mulya disarankan untuk memperkuat tata kelola operasional melalui penjadwalan pengangkutan yang lebih sistematis dan optimalisasi armada serta tenaga kerja agar layanan lebih merata. Selain itu, diperlukan pencatatan operasional yang terdokumentasi secara berkala sebagai dasar evaluasi kinerja, disertai peningkatan kapasitas sumber daya

manusia melalui pelatihan teknis dan manajerial. Perbaikan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat juga penting agar pelayanan bersifat lebih responsif dan antisipatif.

3. Masyarakat Desa Girirejo

Masyarakat Desa Girirejo diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, baik melalui kepatuhan terhadap mekanisme layanan TPS 3R maupun melalui penyampaian aspirasi dan masukan secara konstruktif. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kebijakan serta mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas keterwakilan informan, khususnya dari dusun yang belum berlangganan layanan TPS 3R, agar analisis pemerataan dan distribusi manfaat kebijakan dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pendataan operasional pada tingkat TPS 3R, seperti pencatatan volume timbulan sampah, frekuensi pengangkutan, dan kapasitas pengolahan secara berkala, sehingga tersedia basis data kuantitatif yang mendukung evaluasi kebijakan secara lebih terukur.